



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN**

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan visi, misi dan tujuannya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana teknis dibidang Pangan dan Peternakan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama sebagai pedoman perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2017 - 2021.

Jember,

2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN JEMBER



drh. ANDI PRASOWO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP . 19650606 199202 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER...	7
1.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.....	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JEMBER.....	20
2.3. SUMBER DAYA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.....	21
2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.....	24
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN	



	TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER.....	28
3.2.	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	29
3.3.	TELAAHAN RENSTRA KEMERNTERIAN RI DENGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR.....	37
3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....	39
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	41
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	43
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	44
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	45
BAB VII	PENUTUP.....	48
	LAMPIRAN	

**BAB 1****PENDAHULUAN****1.1. Latar belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember tetap berpedoman pada Perubahan RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra OPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember tahun 2017-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025



17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember selama kurun waktu 2017-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember tahun 2017-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER**
 - 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
 - 2.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
 - 2.3 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
 - 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
 - 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra KEMENTAN RI, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan



Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang.

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.



2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

a. Tugas dan Fungsi

1. Menyelenggarakan kewenangan dibidang Ketahanan Pangan dan Peternakan.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris kabupaten.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas

Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan dan Melaporkan Kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program dan Keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Fungsi

- Penyusunan rencana dan pembinaan organisasi tatalaksana ;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dinas, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan ;
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan ketahanan pangan dan peternakan ;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dan 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :



1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

a. Tugas

- Melaksanakan ketatausahaan penerimaan dan pengiriman surat, pengadaan naskah dinas dan kearsipan dinas;
- Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat;
- Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Fungsi

- Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan, urusan rumah tangga dan protokol;
- Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas ;
- Pelaksanaan evalusai dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- Pengurusan kendaraan dan alat pengangkutan lain milik badan ;
- Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- Persiapan seluruh rencana kepatuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian;
- Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- Penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan barang perlengkapan dan perbekalan ;
- Pengadaan, Pembinaan, penggunaan pengundangan serta memelihara barang perlengkapan dan perbekalan ;
- Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas

- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyusun rencana program kegiatan anggaran dan laporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Fungsi

- Penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran ;
- Penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja dinas;
- Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- Perhitungan anggaran dan verifikasi;
- Pentausahaan pembayaran gaji pegawai;
- Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan; dan
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



3. BIDANG PETERNAKAN

a. Tugas

- Membina pembibitan ternak, budidaya dan pengembangan ternak;
- Melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran;
- Melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak;
- Mengembangkan kawasan peternakan dengan penyebaran ternak;
- Menerbitkan izin usaha ternak/produk ternak; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak;
- Pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pengawasan mutu pakan ternak ;
- Pengelolaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak ;
- Pengelolaan wilayah/kawasan sumber bibit ternak ;
- Pengelolaan pengembangan lahan penggembalaan umum ;
- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan budidaya ternak, pengolahan pakan ternak, pengolahan produk ternak dan pemasaran hasil peternakan ;
- Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- Penerbitan izin usaha bidang peternakan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Peternakan terdiri dari 1) Seksi Pembibitan Ternak; 2) Seksi Budidaya Pakan dan Pengembangan Ternak; 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan Investasi. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pembibitan Ternak;

a. Tugas

Melaksanakan pengawasan pembibitan ternak serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peternakan.



b. Fungsi

- Penyusunan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran kebutuhan semen dan mudigah ;
- Pembinaan pengelolaan produksi ternak bibit ;
- Pemantauan dan pengawasan mutu ternak bibi ;
- Pelaksanaan bimbingan registrasi hasil inseminasi buatan ;
- Pembinaan, bimbingan, peredaran dan peningkatan mutu bibit ternak ;
- Pelaksanaan pembinaan pelayanan inseminasi buatan dan mudigah ;
- Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan ;
- Pelaksanaan bimbingan pelestarian plasma dan pelaksanaan seleksi ternak ; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Budidaya Pakan dan Pengembangan Ternak;

a. Tugas

- Meningkatkan manajemen peternakan dan pengembangan ternak;
- Melaksanakan urusan pakan dan teknologi peternakan ; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

b. Fungsi

- Pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak ;
- Pelaksanaan bimbingan, identifikasi serta evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ;



- Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak ;
- Pelaksanaan administrasi pengelolaan ternak ;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak ;
- Pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ternak ;
- Pelaksanaan penerapan kebijakan pakan ternak ;
- Pemantauan, pengawasan peredaran pakan ternak ;
- Pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu pakan ternak ;
- Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan ternak ;
- Pengembangan lahan hijauan pakan ternak ;
- Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi peternakan ;
- Pengkajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan ;
- Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga – lembaga teknologi peternakan ; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Investasi;

a. Tugas

- Melaksanakan kebijakan pembinaan pengolahan, pemasaran dan penerbitan izin usaha peternakan berwawasan agribisnis ; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

b. Fungsi

- pendataan, penelitian penanganan dan pengolahan hasil peternakan ;
- pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengadaan sarana penanganan dan pengolahan serta pemasaran usaha rakyat hasil peternakan;



- pemberian pelayanan perijinan usaha peternakan ;
- pelaksanaan promosi dan penyebaran informasi potensi dalam pengembangan investasi atau penanaman modal usaha peternakan;
- pengembangan kemampuan sumberdaya manusia, baik itu petugas atau pelaku pembangunan lain dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya peternakan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bina usaha dan pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG KESEHATAN HEWAN

a. Tugas

- Melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Ikan dan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Pengawasan, pengamatan dan epidermiologi penyakit hewan dan ikan serta membuat peta penyakit hewan;
- Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
- Pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan;
- Pemrosesan perijinan di bidang kesehatan hewan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 3) Kesehatan Masyarakat, Veteriner, dan Standarisasi Mutu. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :



1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;

a. Tugas

- Melaksanakan pengamatan penyakit dan pengawasan dalam pendistribusian obat hewan serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pengamatan, penyidikan dan Inventarisasi epidemiologi penyakit hewan;
- Pengevaluasian, menyajikan data epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan;
- Pelaksanaan bimbingan, pelaporan dan pendataan penyakit individual menular mewabah;
- Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
- Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskesmas, praktek dokter hewan, klinik hewan);
- Pemberian pelayanan medic/ paramedic veteriner di daerah;
- Pelaporan pelayanan medic/ paramedic veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/ non menular, penyakit individual, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
- Pengindentifikasian, inventarisasi pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, took, kios, dan pengecer;
- Pemberian izin usaha obat hewan dan penertiban perizinan bidang obat hewan;
- Pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.



2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

a. Tugas

- Tindakan mencegah dan memberantas penyakit hewan serta tugas lain dari Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan pencegahan penyakit hewan menular;
- Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penyakit zoonosis;
- Pelaksanaan bimbingan dan pemberantasan penyakit hewan;
- Pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- Pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan;
- Pelaksanaan penutupan dan pembukaan wilayah pada penyakit hewan hewan menular yang mewabah di daerah;
- Pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/ masuk di daerah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Kesehatan Masyarakat, Veteriner dan Standarisasi Mutu;

a. Tugas

- Melaksanakan tugas di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan;
- Pelaksanaan pelayanan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas;
- Pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dan ikan dari residu obat hewan, kimia dan bahan toksik;



- Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi para produsen dan tempat penjualan produk asal hewan;
- Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke daerah;
- Pelaksanaan bimbingan penerapan dan standart teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet;
- Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- Pemberian surat keterangan asal hewan, produk hewan, dan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan;
- Pemberian izin usaha RPH/RPU; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG KETAHANAN PANGAN

a. Tugas

- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi

- Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
- Pengkoordinasian, pengendalian, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

1) Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan

a. Tugas

- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Fungsi

- Penyusunan rencana ketersediaan dan distribusi pangan sesuai dengan rencana Dinas;
- Pengkajian kebutuhan dan ketersediaan pangan;
- Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan, akses dan distribusi pangan;
- Pelaksanaan survey dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan serta pola pengadaan dan cadangan pangan;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan;
- Penyusunan sistem pemantauan, dan pengamanan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan;
- Pengembangan terhadap upaya pengadaan dan cadangan pangan serta pemerataan pangan;
- Penyusunan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi;
- Pelaksanaan survey dan mengidentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi;
- Pelaksanaan evaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi;
- Pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi;
- Pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan koordinasi pengamanan terhadap distribusi pangan, kebijakan harga dasar gabah, serta harga bahan pangan yang layak bagi masyarakat;
- Pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan;
- Pemberian fasilitasi terhadap kelembagaan distribusi pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.



2) Seksi Pemanfaatan Pangan

a. Tugas

- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Penyusunan rencana seksi pemanfaatan pangan;
- Penyusunan, penetapan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi pangan dan gizi;
- Pengidentifikasian potensi sumber daya dan produksi serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- Pembinaan pengembangan pemanfaatan pekarangan;
- Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- Pemberian fasilitasi dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan;
- Pelaksanaan sosialisasi konsumsi pangan yang bermutu dan bergizi; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

6. U P T

- UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.



7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten terdiri dari:

A. KEPALA DINAS

B. SEKRETARIS DINAS TERDIRI DARI :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

C. BIDANG PETERNAKAN TERDIRI DARI :

1. Seksi Pembibitan Ternak
2. Seksi Budidaya Pakan dan Pengembangan Ternak
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan Investasi

D. BIDANG KESEHATAN HEWAN TERDIRI DARI :

1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Standarisasi Mutu

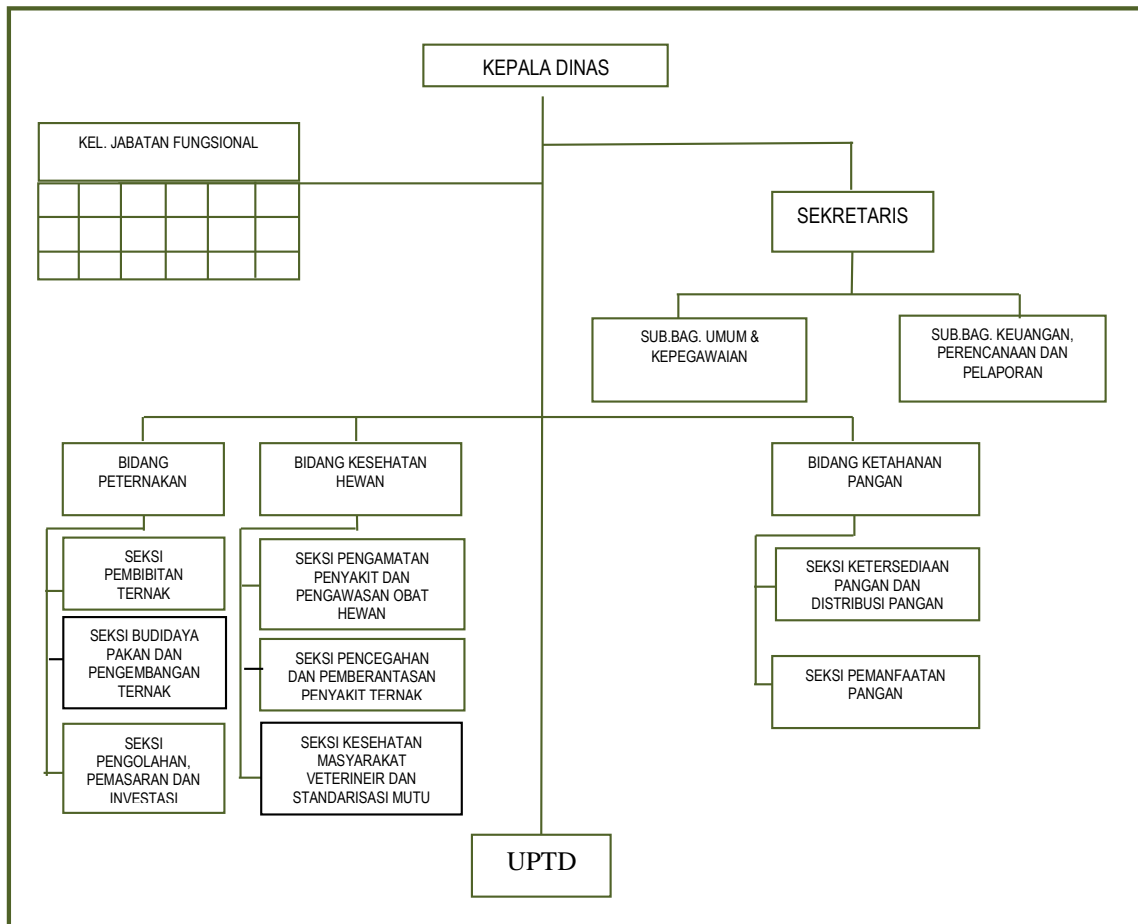
E. BIDANG KETAHANAN PANGAN TERDIRI DARI :

1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan,
2. Seksi Pemanfaatan Pangan

F. JABATAN FUNGSIONAL.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Jember



2.3. Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Bappeda Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 71 orang dengan rincian sebagai berikut.



1. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 71 orang, dari status kepegawaian sumberdaya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Status Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Jember

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	68
2	Non PNS	6
JUMLAH		74

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Data Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	13
2	GOLONGAN III	28
3	GOLONGAN II	25
4	GOLONGAN I	2
JUMLAH		68

Dari table tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 26 orang (40% dari seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan dan peternakan di Kabupaten Jember, masih



diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
	PNS	
1	PASCA SARJANA S-2	8
2	SARJANA S-1	26
3	DIPLOMA III	2
6	SLTA	28
7	SLTP	2
8	SD	2
JUMLAH		68
	NON PNS	
1	SARJANA S-1	2
2	SLTA	4
JUMLAH		6
JUMLAH TOTAL		74

Berdasarkan table tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan structural eselon IV. Jabatan structural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.



2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Jember

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berperan dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Jember dituntut untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam membuat regulasi tentang ketahanan pangan dan peternakan sehingga proses produksi, distribusi dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten jember terjaga.

Jenis pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember meliputi :

1. Pelayanan Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan merupakan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas bibit ternak terutama ternak sapi dan kambing. Dengan teknologi ini diharapkan produktifitas ternak dapat meningkat dimana dengan ternak lokal berat hidup ternak sapi siap potong hanya mencapai paling tinggi 350 kg , sedangkan ternak hasil inseminasi buatan berat badanya dapat menacapai 600 kg sampai dengan 800 Kg.

2. Pemeriksaan Kebuntingan

Pemeriksaan kebuntingan merupakan pelayanan lanjutan dari Inseminasi Buatan dimana ternak yang telah di lakukan Inseminasi Buatan minimal 2 bulan perlu dilaksanakan Pemeriksaan kebuntingan (PKB) untuk mengetahui ternak tersebut sudah bunting atau belum. Dengan demikian peternak segera tahu dan yakin bahwa ternak yang dipelihara sudah bunting atau belum.

3. Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan pelayanan medik veteriner yang dilakukan oleh Dokter Hewan di Pos Kesehatan (Pusat Kesehatan Hewan) Pelayanan ini bersifat aktif maupun pasif dimana untuk pelayanan aktif dokter Hewan Poskeswan memberikan pelayanan percontohan lewat kelompok ternak sedangkan pelayanan aktif pelayanan yang diberikan oleh



dokter hewan Poskeswan sesuai dengan permintaan masyarakat peternak membutuhkan. Selain itu ada pelayanan secara gratis kepada peternak yang dilakukan oleh Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang sudah diprogramkan setiap tahun.

4. Penanganan Gangguan Reproduksi

Gangguan reproduksi merupakan masalah yang cukup penting untuk diatasi karena bila ternak mengalami gangguan reproduksi akan sulit untuk bunting dan melahirkan anak, keadaan ini akan menurunkan jumlah kelahiran ternak yang pada akhirnya juga akan menurunkan produktifitas ternak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan reproduksi antara lain karena pemberian pakan yang kurang berkualitas maupun karena perawatan pasca melahirkan yang tidak baik. Kesadaran peternak untuk memeriksakan ternaknya yang mengalami kesulitan bunting ini masih rendah, peternak cenderung menjual ternaknya bila dikawinkan beberapa kali tidak segera bunting. Oleh sebab itu pelayanan ini cenderung bersifat aktif dimana petugas harus sering memberikan percontohan untuk menangani gangguan reproduksi.

5. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

Pemotongan hewan / ternak merupakan kegiatan yang harus dikontrol dan diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember karena proses pemotongan hewan berpotensi menularkan penyakit yang bersifat Zoonosis (menular dari ternak ke manusia), disamping itu juga agar dapat tersedia daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Di Kabupaten Jember terdapat 12 Rumah potong hewan yang melayani pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan daging se Kabupaten Jember.

6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Jember mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan hewan yang akan di kirim ke Luar Propinsi Jawa Timur khususnya yang berasal dari Kabupaten Jember dengan mendapatkan bagi hasil retribusi dari Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan.



2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Jember

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG's yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environment , serta menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi Tentang Ketahanan Pangan sekaligus mejadi regulator bidang Peternakan di Kabupaten Jember. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

7. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Adanya pasar bebas di era globalisasi sehingga setiap komoditas pangan dan peternakan di Kabupaten Jember harus bisa bersaing dengan komoditas pangan dan peternakan dari daerah lain maupun luar negeri.
2. Anomali Iklim yang tidak menentu yang menyebabkan penurunan produksi pangan;
3. Masih adanya bahan pangan pokok yang belum bisa berswasembada (Ketersediaanya masih kurang);
4. Diversifikasi pola konsumsi masyarakat masih masih rendah sehingga ketergantungan terhadap salah satu komoditas bahan pangan masih dominan;
5. Sumberdaya Manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada masih kurang optimal;
6. Belum kokohnya menejemen kelembagaan kelompok baik kelompok tani maupun kelompok peternak di Kabupaten Jember;



7. Sulitnya petani dan peternak kecil dalam mengakses permodalan dari perbankan.

8. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kabupaten Jember;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas;
4. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta stakeholder Ketahanan Pangan dan Peternakan lainnya.
6. Permintaan pasar akan komoditas pangan dan peternakan masih terbuka luas.
7. Potensi Sumberdaya Alam kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan dan peternakan masih sangat besar.

**BAB III****ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember**

Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember selama beberapa tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Kabupaten Jember yaitu:

1. Lemahnya manajemen pembangunan bidang ketahanan pangan dan peternakan dalam mengantisipasi dinamika pembangunan;
2. Belum tersedianya data dasar pembangunan yang siap digunakan setiap waktu, valid, dan terintegrasi;
3. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan dan peternakan;
4. Pembangunan ketahanan pangan dan peternakan belum terintegrasi antar sektor dan atau antar wilayah;
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;
7. Masih kurangnya akomodasi aspirasi masyarakat dalam



pembangunan ketahanan pangan dan peternakan;

8. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan peternakan masih kurang intensif;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016–2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran



dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan



hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan



terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengandemikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat



Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai ± 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :



Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan keseluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.



Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, seta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan



ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang merusak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI Dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Visi Kementerian Pertanian RI adalah “ *Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani* “. Dengan Misi :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani;



4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur adalah *"Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan"* dengan misi :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan
2. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri.

Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur adalah *"Terwujudnya Agribisnis Peternakan Jawa Timur Yang Berdaya Saing Dan Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Terhadap Produk Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal"*, dengan Misi :

1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pangan Hewani Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal;
2. Mengembangkan Produk Peternakan Unggulan Yang Berdaya Saing Menghadapi Era Persaingan Bebas;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Peternak Melalui Kelembagaan Yang Tangguh Dengan Berperan Aktif Dalam Merubah Pola Usaha Tradisional Menjadi Pola Usaha Berorientasi Bisnis.

Dilihat dari Misi Tiga Lembaga di atas, ternyata senafas dengan Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis Agribisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan, yang mana dari misi ketiga tersebut sebagian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dengan Tujuan Meningkatkan Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengikat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Kawasan peruntukan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Ternak Besar Meliputi :
 - a. Ternak sapi potong berada diseluruh Kecamatan
 - b. Ternak sapi perah berada di Kecamatan : Arjasa, Silo, Sumberjambe, Puger, Wuluhan Tempurejo, Tanggul, Patrang, Kaliwates, Gumukmas, Sumberbaru, Sumberjambe dan Balung.
 - c. Ternak Kuda berada di Kecamatan : Kalisat, Tanggul, Bangsalsari, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Sumberbaru, Jombang, Rambipuji, Pakusari dan Mayang.
 - d. Ternak Kerbau berada di Kecamatan : Jombang, Ambulu, Gumukmas, Umbulsari, Puger, Semboro, Sumberjambe, Ledokombo dan Kencong.



2. Ternak Kecil Meliputi :
 - a. Ternak Kambing berada di seluruh Kecamatan
 - b. Ternak Domba berada di seluruh Kecamatan
 - c. Ternak Babi berada di Kecamatan : Ambulu, Umbulsari dan Semboro
3. Unggas Meliputi :
 - a. Ternak Itik berada diseluruh Kecamatan;
 - a. Ternak Ayam Buras berada di seluruh kecamatan;
 - b. Ternak Ayam Ras Petelur berada di seluruh kecamatan;
 - c. Ternak Ayam Ras Pedaging berada diseluruh kecamatan;

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

2. Kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
3. Segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi



Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Disperikel Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Disperikel Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi



permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
2. Hasil analisis Renstra Kementan, Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
3. Hasil telaahan RTRW
4. Hasil analisis KLHS

Isu-Isu strategis pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Jember antara lain :

1. Belum tercukupinya sarana dan prasarana pendukung untuk mencukupi ketersediaan pangan Masyarakat.
2. Adanya kebijakan impor bahan pangan dan ternak beserta turunannya sehingga petani sulit mendapatkan pendapatan yang sebanding dengan biaya usaha.
3. Lemahnya Pengawasan Distribusi dan Peredaran Produk Pangan dan Ternak di Masyarakat.
4. Adanya resistensi di masyarakat dari adanya usaha peternakan.
5. Intensifikasi dan diversifikasi usaha pengolahan pangan dan peternakan yang belum optimal sehingga turunnya daya saing produk pangan dan peternakan.



BAB IV

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN**

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi 3 yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya saing, Berbasis Agribisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan" dengan Tujuan "Meningkatkan Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan" dengan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Produk Peternakan
3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pangan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1 (*lampiran 1.*)



BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 (*lampiran 3.*) dan Tabel 5.2 (*lampiran 4.*)



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1
 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian									
1.1	Jumlah lumbung pangan di Desa/kelurahan (lumbung pangan)	n/a	10	20	50	50	58	60	248	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan									
2.1	Skor Pola Pangan Harapan konsumsi	87,22	93,01	93,25	93,50	93,75	94,00	94,25	94,25	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.2	Rasio produksi pangan dibanding kebutuhan pangan (Padi, jagung kedelai)									Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	a. Padi	2,65	2,34	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,69	
	b. Jagung	20,35	17,16	20,36	20,37	20,38	20,39	20,40	20,40	
	c. Kedelai	0,91	0,72	0,94	0,96	0,98	0,99	1,00	1,00	
1	Sarana Pertanian									
1.14	Jumlah produksi hasil ternak per tahun									Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	a. Daging Sapi (Ton)	1.978	2.116	2.125	2.150	2.175	2.200	2.225	2.225	
	b. Daging Kerbau (Ton)	2	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Daging Babi (Ton)	9	14,5	15	17,5	20	22,5	25	25	
	d. Daging Kambing (Ton)	237	266	280	290	300	310	323	323	
	e. Daging Domba (Ton)	473	484	495	507	513	519	529	529	
	f. Daging Unggas (Ton)	22.205	20.071	22.732	23.170	23.662	24.154	24.727	24.727	
	g. Susu (Ton)	2.309	2.884	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.000	
	h. Telur (Ton)	11.124	13.827	14.250	14.700	15.200	15.800	16.500	16.500	



NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1.15	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	0	15	22	29	36	43	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1.16.	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan (Unit)	170	171	180	190	200	210	230	230	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

**BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

LAMPIRAN

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER

Lampiran 1

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan	Nilai PDRB		1.1 Meningkatnya Prod.	Jumlah Produksi Hasil Ternak							Optimalisasi Penerapan	Meningkatkan Prod.	- Pencegahan dan
	Nilai PDRB Sub	Sub Kategori		Hasil Peternakan	Pertahun (Ton)							Teknologi Peternakan	dan Produksifitas	Penanggulangan
	Kategori	Peternakan			- Daging sapi		2.125	2.150	2.175	2.200	2.225		Peternakan Berbasis	Penyakit Ternak
	Peternakan				- Daging Babi		15	18	20	23	25		Teknologi dan Keu-	
					- Daging Kambing		280	290	300	310	323		nggulan Sumberdaya	- Peningkatan Prod.
					- Daging Domba		495	507	513	519	529		Lokal	Hasil Peternakan
					- Daging Unggas		22.732	23.170	23.662	24.154	24.727			
					- Susu		3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	Pengendalian dan	Meningkatkan	- Peningkatan
					- Telur		14.250	14.700	15.200	15.800	16.500	Pencegahan Penyakit	Kesehatan Ternak	Penerapan
												Hewan Menular dan	dan Kualitas Produk	Teknologi Peternakan
											Meningkatkan Penga-	Peternakan		
											wasan Kesmavet			
				1.2 Meningkatnya Nilai	Nilai NTP Sub Kategori		103,5	104	104,5	105	105,5	Meningkatkan Nilai	Memberikan	- Peningkatan
				Tambah Hasil Produk	Peternakan							Produksi peternakan	Kemudahan Izin	Pengolahan Hasil
				Peternakan								Dengan meningkatkan	Investasi	Prod. Peternakan
												Populasi dan Produksi	Peternakan Yang	
												Ternak	Ramah Lingkungan	- Pengembangan
														SDM Peternakan
														- Peningkatan
														Pemasaran Hasil
														Produksi
														Peternakan
2	Meningkatkan	Skor NBM		2.1 Meningkatnya	Rasio Produksi Pangan di							Meningkatkan Keterse-	Tersedianya Pangan	- Peningkatan Ketah-
Ketahanan				Ketersediaan Pangan	Banding Kebutuhan Pangan							diaan Pangan dan	yang Cukup dan	anan Pangan
Pangan				Masyarakat	- Padi		2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	Akses Pangan	Merata untuk	(Pertanian/
					- Jagung		20,36	20,37	20,38	20,39	20,4		Seluruh Penduduk	Perkebunan)
					- Kedelai		0,94	0,96	0,98	0,99	1			

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2.2 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		93,25	93,5	93,75	94	94,25	Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pangan	Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal	- Peningkatan Diversifikasi Pangan

Jember,

2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER



Drs. ANRI PRASTOWO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650605 199202 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai PDRB sub Kategori Peternakan	1. Nilai PDRB Sub Kategori Peternakan	Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung BPS	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan	BPS
2	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1. Jumlah Produksi hasil temak pertahun	Jumlah Tonase hasil produksi ternak per komoditas yang di hasilkan selama 1 tahun	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan	Laporan Statistik Bulanan Dinas KP dan Peternakan
3	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Produk Peternakan	1. Nilai NTP Sub kategori peternakan	Nilai yang di peroleh peternak atas usaha peternakan dalam 1 tahun Biaya yang di keluarkan peternak untuk usaha peternakan selama 1 tahun	Bidang Peternakan Bidang Kesehatan Hewan	BPS
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Skor Neraca Bahan Makanan (NBM)	Skor NBM di hitung oleh pihak akademisi yang independen dengan menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya	Bidang Ketahanan Pangan	Dinas KP dan Peternakan
5	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	1 Rasio Produksi Pangan di Banding Kebutuhan Pangan	Jumlah Produksi Pangan Jumlah Kebutuhan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Lap. Statistik Pertanian
6	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH di hitung oleh pihak akademisi yang independen dengan menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya	Bidang Ketahanan Pangan	Dinas KP dan Peternakan

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Lampiran 3

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Rencana Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Pemegang Jamb	Lokasi														
						Tahun 2019		Tahun 2017		Tahun 2015		Tahun 2013		Tahun 2011		Tahun 2009				Target	Rp												
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
Meningkatkan Nilai PDPS Suku Kategori Peternakan	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Hasil Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Angka Kematian Ternak dari Total Populasi Ternak di Kab. Jember	1	0,9	1.854.369.600	0,9	720.000.000	0,8	900.000.000	0,8	920.000.000	0,8	950.000.000	0,8	970.000.000	0,8	6.314.369.600	Bidang	Jember												
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit Menular Ternak	- Jumlah Ternak Yang diperiksa dan diobati secara gratis			151.000.000		286.921.500		300.000.000		300.000.000		310.000.000		310.000.000		1.658.822.500														
				- Sapi	1.000	1.000		1.500		2.000		2.500		3.000		3.300		3.500															
				- Kambing/Domba	200	250		300		350		400		450		500		500															
				- Unggas	8.000	10.000		13.000		20.000		25.000		30.000		33.000		35.000															
				- Hewan Kesayangan	150	200		300		350		400		450		500		500															
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Jumlah Fasilitas Layanan Masyarakat Veteriner yang Di bangun/Rehabilitasi			1.612.354.000		250.067.400		300.000.000		250.000.000		250.000.000		270.000.000		2.933.021.400														
				- Pembangunan RPH/BPU	4	1				1																							
				- Rehabilitasi RPH/BPU	1	1																											
				- Jumlah Pengadaan Sarpras RPH/BPU		18		22		22		22		22		22		22		128													
				- Jumlah Pemeriksaan Sample Daging dan Susu		8																											
			Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Ikan	- Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Sample Cecak, Darah dan Karbon Kulit		12		32.962.000		12		68.430.400		24		75.000.000		24		75.000.000		120		401.432.400									
			Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan Menular	- Jumlah Kecamatan Sasaran Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan Menular		31		56.553.600		31		114.519.700		31		225.000.000		31		295.000.000		31		315.000.000		31		313.000.000		31		1.321.073.300	
				- Jumlah PUSKESWAN Yang Di Bangun		1				2				3				3				3											
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Jumlah Populasi Ternak (ekor)			498.750.260		2.956.189.700		750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		6.754.930.960	Bidang	Jember												
				- Populasi Sapi Perah	243.390	250.000		253.000		258.300		263.600		268.700		274.095		274.095															
				- Populasi Sapi Perah	1.338	1.350		1500		1700		1950		2250		2600		2600															
				- Populasi Kambing	50.259	51.250		52.275		53.320		54.380		55.475		56.583		56.583															
				- Populasi Domba	75.950	75.500		77.010		78.550		80.125		81.750		83.358		83.358															
				- Populasi Ayam Buras	1.698.475	1.732.000		1.766.640		1.801.900		1.838.000		1.874.750		1.912.288		1.912.288															
				- Populasi Ayam Ras Petelur	1.109.578	1.130.000		1.152.600		1.175.650		1.199.200		1.223.150		1.247.611		1.247.611															
				- Populasi Ayam Ras Pedaging	2.020.006	2.050.000		2.080.750		2.111.960		2.143.650		2.175.800		2.208.432		2.208.432															
				- Populasi Itik	183.606	187.000		190.500		194.000		197.650		201.300		205.050		205.050															
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	- Jumlah sarpras Pembibitan Ternak Yang diadukan																													
			Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Pada Masyarakat	- Jumlah Bibit (semen) Ternak Yang didistribusikan Pada Masyarakat		90.000		93.000		100.000		140.000.000		110.000		130.000.000		120.000		140.000.000		130.000		150.000.000		140.000		160.000.000		693.000		720.000.000	
			Pengembangan Agribisnis Peternakan	- Jumlah Sosialisasi Agribisnis Peternakan		5		49.225.000																									
			Peningkatan Kualitas Gai dan pakan ternak	- Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Ransum Pakan		50		24.000.000		100		67.936.000		100		70.000.000		150		80.000.000		150		80.000.000		200		90.000.000		750		411.936.000	
			Pendataan Produksi Peternakan	- Jumlah Data Peternakan		1		15.000.000																									
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah Money Yang dilaksanakan		2		5.250.000																									
			Pengembangan sapi Perah	- Jumlah Ternak Sapi Perah Yang dikelola		30		215.460.260		35		700.000.000		40		400.000.000		45		410.000.000		50		420.000.000		55		300.000.000		33		2.445.460.260	

Tipe	Sumber	Indikator Besaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penyelenggara	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			- Peningkatan Peran dan Fungsi Penyuluhan	Jumlah Penyuluhan		5	19.780.000												5	19.780.000			
			- Kontes Ternak	Jumlah Ternak Yang Mengikuti Kontes	0	0		186	513.000.000			186		186			186		186	513.000.000			
			- Perumbuhan dan Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat	Jumlah SPB yang Terbentuk	15	150.000.000	22	1.535.244.700	29	150.000.000	34	170.000.000	43	200.000.000	50	350.000.000	50	2.555.244.700					
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Produk Peternakan	Nilai NTP Peternakan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	Prosentase Meningkatnya Nilai Penjualan Hasil Peternakan		10	38.510.000	10,0	647.928.000	10,0	350.000.000	10,0	380.000.000	10,0	400.000.000	10,0	425.000.000	10	2.241.493.000	Bidang Peternakan	Jember			
			- Fasilitas Kerja sama Regional/Nasional/Internasional	Jumlah Peserta Temu Usaha Peternakan	0	0	200	103.800.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	1.000	503.800.000					
			- Pemeliharaan Rutin Berkele Sustainable Prod. Hasil Peternakan	Jumlah sapi/ sapi pasar Produksi Peternakan yang diperbaiki	0	0	2	279.600.000									2	279.600.000					
			- Promosi Atas Hasil Produk Peternakan Unggulan daerah	Jumlah Peserta Pelantikan Gerakan Minum Susu dan Telur	0	0	200	64.170.000	200	70.000.000	250	100.000.000	300	120.000.000	350	145.000.000	1.300	499.179.000					
				Jumlah Partisipasi Dalam Pameran Peternakan	0	0	2										2						
			- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produk Peternakan Masyarakat	Jumlah Suwai Harga Pasar	0	0	12	40.400.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	180.600.000					
			- Monitoring, Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monev	0	0	1	159.950.000		150.000.000		150.000.000				150.000.000		150.000.000		759.950.000			
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Prosentase Kelompok Peternak Yang Mengaplikasikan Teknologi Peternakan Tepat Guna	60	65	110.503.000	70	62.500.000	75	100.000.000	80	150.000.000	85	200.000.000	90	300.000.000	90	923.003.000	Bidang Peternakan	Jember		
			- Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Peternakan Tepat Guna	100	110.503.000	100	62.500.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	600	923.003.000					
			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	170	175	266.512.500	180	266.512.500	190	250.000.000	200	350.000.000	210	400.000.000	220	500.000.000	220	1.766.512.500	Bidang Peternakan	Jember		
			- Peningkatan Sumberdaya Manusia Peternakan	Jumlah Peserta Pembinaan	0	0	250	89.312.500	300	200.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	400	450.000.000	1.350	1.389.312.500					
			- Penyusunan database Peternakan	Jumlah laporan	0	0	1	177.200.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	377.200.000					
			Program Pembinaan Lingk. Sosial	Jumlah Pembinaan Kelompok Penerima Hibah	19	12	925.868.000	15	2.227.225.408	18	2.425.000.000	20	2.655.000.000	22	2.985.000.000	25	3.113.000.000	112	14.233.093.408	Bidang Peternakan	Jember		
			- Pembinaan Kemampuan Dan Keterampilan Kerja dan Masyarakat	Jumlah Paket bantuan Hibah	10	11	925.868.000	15	2.227.225.408	18	2.425.000.000	20	2.655.000.000	22	2.985.000.000	25	3.113.000.000	112	14.233.093.408				
			Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produk Peternakan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Yang Terdaftar			10	59.985.000	13	100.000.000	16	130.000.000	19	160.000.000	22	200.000.000	22	649.985.000	Bidang Peternakan	Jember			
			- Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Prod. Peternakan	Jumlah Peserta pelatihan Teknologi Pengolahan	0	0	40	26.685.000	60	60.000.000	80	80.000.000	100	120.000.000	120	150.000.000	400	436.685.000					
			- Penyediaan Peralatan Pengolahan Hasil Prod. Peternakan	Jumlah Peralatan Pengolahan yang Diadakan	0	0	3	33.300.000	4	40.000.000	4	50.000.000	3	40.000.000	4	50.000.000	18	213.300.000					

Tahun	Basis	Indikator Baseline	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Sarung Pendukung												Kendali Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja BRPD Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan di Bandung	Rasio Produksi Bahan Pangan di Bandung	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perikanan)	Prosentase Meningkatnya Ketersediaan Produk Pangan					1.754.405.000		2.800.000.000		2.980.000.000		3.620.000.000		3.820.000.000		14.974.405.000	Bidang Ketahanan Pangan	Jember				
		- Padi						2			2		2		2		2		2						
		- Jagung						2			2		2		2		2		2						
		- Kedelai						2			2		2		2		2		2						
		- Penanganan Daerah Rawan Pangan		Jumlah Laporan SKPG		1	80.000.000		1	60.000.000		1	80.000.000		1	80.000.000		1	80.000.000	5	400.000.000				
		- Pemanfaatan dan Analisis Akses pangan masyarakat		Jumlah Peserta Pelatihan POKTAN/GAPOKTAN Tertinggi Distribusi Pangan			50	227.210.000		100	230.000.000		100	230.000.000		100	230.000.000		100	230.000.000	450	1.147.230.000			
		- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan		Jumlah laporan NBM dan FFH		2	106.450.000		2	120.000.000		2	120.000.000		2	120.000.000		2	120.000.000		2	120.000.000	10	586.450.000	
		- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Laporan Moneyva		1	170.160.000		1	175.000.000		1	175.000.000		1	175.000.000		1	175.000.000		1	175.000.000	9	870.160.000	
		- Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat		Jumlah Lumbung Yang di Bangun		10	454.000.000		20	1.795.000.000		50	1.950.000.000		58	2.915.000.000		60	2.863.000.000		248	9.979.000.000			
		- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari		Jumlah Kelompok sasaran KRPL			13	497.215.000		13	400.000.000		15	100.000.000		15	100.000.000		15	100.000.000		75	1.197.215.000		
		- Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan		Jumlah Dokumen Peta Ketahanan Pangan		1	219.370.000					1	225.000.000					1	250.000.000		3	694.370.000			
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pangan	Skor FFH Konsumsi	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Jumlah Olahan Pangan Baru Yang Tercipta		6	875.000.000		7	400.000.000		8	500.000.000		9	550.000.000		10	700.000.000		40	3.025.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Jember	
		- Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Jumlah Uji Sampling Bahan Pangan		8	100.000.000		8	100.000.000		8	100.000.000		8	100.000.000		8	100.000.000		40	500.000.000			
		- Percepatan Pengenalaragaman dan Konsumsi Pangan		Jumlah Peserta Sosialisasi Pola Konsumsi B2SA		40	300.000.000		20	50.000.000		40	100.000.000		60	150.000.000		100	250.000.000		260	850.000.000			
		- Pengembangan Pangan Lokal dan Tradisional		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Tradisional		300	175.000.000		100	50.000.000		200	100.000.000		200	100.000.000		250	150.000.000		1.050	575.000.000			
		- Promosi dan Pengembangan Pameran Produk Pangan		Jumlah Partisipasi Pameran Produk pangan		2	300.000.000		2	200.000.000		2	200.000.000		2	200.000.000		2	200.000.000		10	1.100.000.000			



TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN

Lampiran 4

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kemungkinan Puncak		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kemungkinan Puncak Akhir Periode RPJMD (Estimasi 2021)	Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
					100%	2016	2017	2018	2019	2020	2021												
					(Tahun 2016)	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah								
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Ketenagakerjaan dan Peternakan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur Ketenagakerjaan dan Peternakan	Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Aparatur Dinas KP dan Peternakan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi	100	100	0	100	570.900.000	100	614.939.311	100	712.479.098	100	769.055.428	100	852.256.672	9	3.519.836.709	Sekretariat	Jember		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Surat yang terkirim	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	- Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi dan listrik	-	-	-	-	-	120.000.000	-	130.000.000	-	144.000.000	-	145.000.000	-	145.000.000	-	-	-	-	-
			- Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah ATK yang di sediakan selama 1 Tahun	-	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	30.000.000	-	40.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-
			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	18.500.000	-	8.939.311	-	12.679.088	-	12.055.428	-	12.236.672	-	-	-	-	-
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	5.000.000	-	8.000.000	-	8.000.000	-	9.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-
			- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	93.800.000	-	90.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang di sediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	8.400.000	-	8.000.000	-	8.000.000	-	8.000.000	-	8.000.000	-	12.000.000	-	-	-
			- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	28.800.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
			- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	- Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	70.000.000	-	95.000.000	-	-	-	-	-
- Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kegiatan	- Jumlah tenaga pendukung administrasi dan operasional kantor yang tersedia selama 1 tahun	-	-	-	-	-	276.400.000	-	320.000.000	-	330.000.000	-	355.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Guna	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Guna	57	58	0	60	170.258.332	62	183.435.238	65	212.590.754	67	229.497.701	70	254.226.466	70	1.049.958.483	Sekretariat	Jember		
			- Pembangunan gedung kantor/bangunan lainnya pendukung bangunan gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- Pengadaan peralatan gedung kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang di sediakan	-	-	-	-	-	40.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	24.826.466	-	-	-	-	
			- Pengadaan meubelur	- Jumlah meubelur yang di sediakan	-	-	-	-	-	-	-	23.136.898	-	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- Pengadaan pavingisasi dan pagar kantor	- Jumlah volume paving dan pagar kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan siap pakai	-	-	-	-	-	51.466.332	-	51.466.332	-	50.490.754	-	50.307.701	-	50.300.000	-	-	-	-	-
			- Pemeliharaan rutin/berkala mobil/jabatan dan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dan siap pakai	-	-	-	-	-	30.732.000	-	30.732.000	-	31.000.000	-	31.000.000	-	31.000.000	-	-	-	-	-
			- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara dan siap pakai	-	-	-	-	-	36.600.000	-	36.600.000	-	36.600.000	-	36.600.000	-	36.600.000	-	-	-	-	-
			- Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer	- Jumlah alat kantor yang terpelihara dan siap pakai	-	-	-	-	-	11.500.000	-	11.500.000	-	11.500.000	-	11.500.000	-	11.500.000	-	-	-	-	-
			- Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	- Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Angka Presentasi Aparatur	80	83	0	87	17.900.000	90	19.280.814	94	22.345.342	97	24.112.965	100	26.721.657	100	110.360.778	Sekretariat	Jember		
			- Pengadaan pakaian Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Kerja/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari	- Jumlah Pakaian dinas yang di sediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	- Jumlah peringatan hari besar nasional selama 1 tahun	-	-	-	-	-	17.900.000	-	19.280.814	-	22.345.342	-	24.112.965	-	26.721.657	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Menjalani Peningkatan SDM	85	86	0	87	16.700.000	88	17.968.246	89	20.847.330	90	22.496.454	91	24.336.261	91	102.962.291	Sekretariat	Jember		
			- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	- Jumlah aparatur yang di nilai angka kreditnya	-	-	-	-	16.700.000	-	7.968.246	-	7.947.330	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-		
			- Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	- Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	12.900.000	-	14.496.454	-	16.336.261	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Anggaran, Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	10	10	0	10	120.472.998	10	129.766.345	10	150.391.640	10	162.288.339	10	179.845.710	10	742.765.032	Sekretariat	Jember		
			- Penyusunan laporan capaian kinerja (LAKIP) dan lriser realisasikerja OPD	- Jumlah dokumen LKIP yang disusun	-	-	-	-	38.922.998	-	35.000.000	-	35.000.000	-	40.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-		
			- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	-	-	-	-	10.050.000	-	20.000.000	-	23.391.640	-	27.288.339	-	30.000.000	-	-	-	-		
			- Penyusunan RKA dan RAPBD OPD	- Jumlah Dokumen RKA yang disusun	-	-	-	-	30.000.000	-	20.000.000	-	33.000.000	-	35.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-		
			- Penyusunan DPA OPD	- Jumlah Dokumen DPA yang disusun	-	-	-	-	25.000.000	-	29.766.345	-	30.000.000	-	35.000.000	-	38.000.000	-	-	-	-		
			- Penatausahaan dan pelaporan Administrasi Barang Daerah di OPD	- Jumlah Laporan Aset di OPD yang disusun	-	-	-	-	16.500.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	24.845.710	-	-	-	
			- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah Monev yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Kesesuaian Kinerja SKPD Dengan Dokumen Renstra SKPD	85	87	0	89	73.975.000	91	79.681.468	94	92.346.183	97	99.651.208	99	110.432.102	99	456.085.962	Sekretariat	Jember		
			- Penyusunan Renstra, FKPD dan dokumen perencanaan	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	-	-	38.975.000	-	44.681.468	-	52.346.183	-	54.651.208	-	60.432.102	-	-	-	-		
			- Penyusunan profil OPD	- Jumlah Profil OPD yang disusun	-	-	-	-	35.000.000	-	35.000.000	-	40.000.000	-	45.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-		

Jember, 2017
 KEPALA DINAS KETANAGAKERJAAN DAN
 PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
 DR. ANDI PRASETIYO, M.Si
 Pembina Tingkat II
 NIP. 196506051992031001